

**SURAT KETERANGAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**No. 505/C.02.01/LPPM/VIII/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
Jabatan : Kepala  
Unit Kerja : LPPM-Itenas  
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Dr. Eka Wardhani, S.T., M.T.	20050503	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Sosialisasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja  
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kab.  
Bandung Barat Tahun 2021  
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab. Bandung Barat  
Waktu : 24 Maret 2021  
Sumber Dana : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 09 Agustus 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas  
Kepala,

**Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.**  
NPP. 20010601

# **LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI  
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
(DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021**

**Ketua Tim:  
DR. EKA WARDHANI, ST.,MT**

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
MARET 2021**

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sosialisasi Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Ketua Tim :  
Pengusul  
Nama : DR. Eka Wardhani, ST.,MT  
NIP : 20050503  
Jabatan/Golongan : Lektor/ IIBD  
Prodi/Fakultas : Teknik Lingkungan/Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Bidang Keahlian : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Alamat Kantor : Prodi Teknik Lingkungan Jl. PHH Mustofa 23 Bandung 40124  
Alamat Rumah : Jl Tebu Ireng 22 Komplek Pasir Jati Ujung Berung Kabupaten Bandung 40616

Lokasi Kegiatan  
Wilayah Mitra : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat  
Desa/Kecamatan : Mekarsari Kecamatan Ngamprah  
Kota/Kabupaten : Kabupaten Bandung Barat  
Provinsi : Jawa Barat  
Jarak PT ke Mitra : 24 km  
Luaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH)

Waktu : 1 Hari pada tanggal 24 Maret 2021  
Pelaksanaan  
Total Biaya : -

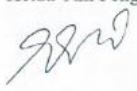
Bandung, 24 Maret 2021

Mengetahui,

Dekan FTSP

  
(DR. SONI DARMAWAN, ST.,MT)  
NIP: 0412017610

Ketua Tim Pengusul

  
(DR. EKA WARDHANI, ST.,MT)  
NIP: 20050503

Disahkan Oleh  
Ketua LP2M,

  
(Iwan Juwana, S.T., M.Eng., Ph.D.)  
NIP: 20010601

# **SOSIALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021**

## **Latar Belakang**

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Khusus di bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandate pembangunan berkelanjutan. Atas dasar uraian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dengan metode pendekatan P-S-R (*Pressure-State-Response*) sesuai dengan Pedoman Nirwasita Tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Diharapkan proses dan ketersediaan dokumen ini dapat memberikan bekal kesamaan informasi dan kesepakatan rencana tindak antara para pelaku kunci untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

## **Maksud**

Tersosialisasinya proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH) kepada semua pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

## **Tujuan**

Membantu pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

## **Rencana Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Melakukan sosialisasi proses penyusunan dokumen DIKPLH KBB tahun 2021 yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 di Ruang Rapat Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat. Acara terdiri dari pembukaan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sosialisasi penyusunan DIKPLH, dan diakhiri dengan diskusi. Sebelum acara sosialisasi dilaksanakan pemateri harus mengikuti pengarahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai peraturan baru penyusunan DIKPLH.

## **Target Luaran**

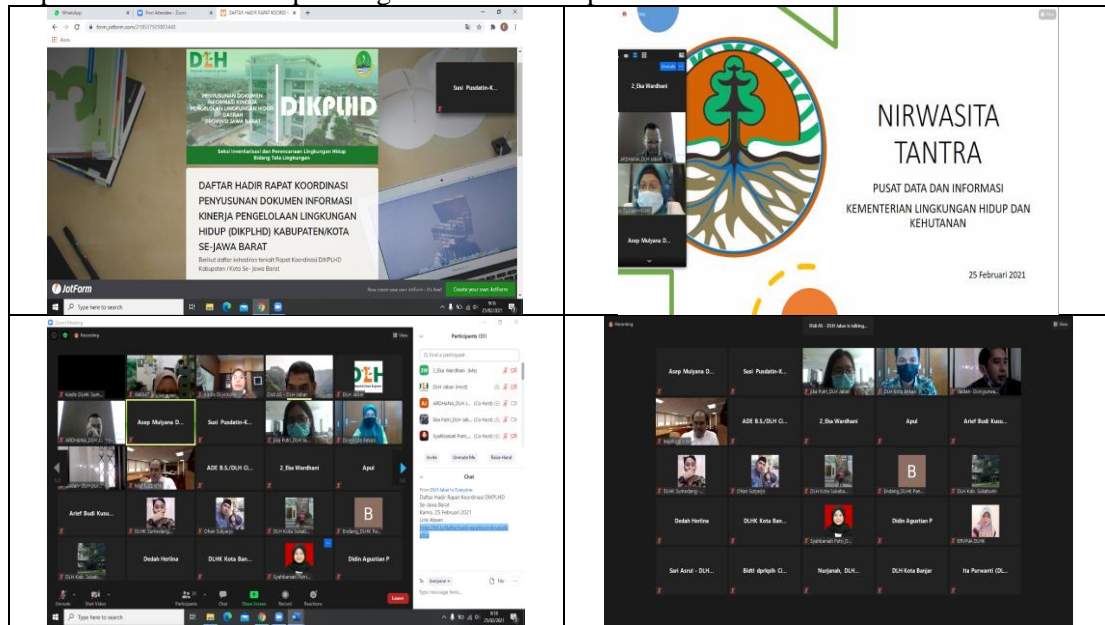
Terjadinya kesamaan pemahaman mengenai pentusuna Dokumen DIKPLH KBB Tahun 2021 di semua pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## **Hasil Kegiatan**

Terjadi kesamaan pemahaman mengenai proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH) kepada semua pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 dengan metode pendekatan D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) sesuai dengan Pedoman Nirwasita Tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Diharapkan proses dan ketersediaan dokumen ini dapat memberikan bekal kesamaan informasi dan kesepakatan rencana tindak diantara para pelaku kunci untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

## DOKUMENTASI KEGIATAN

### Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Sosialisasi pada 25 Februari 2021



### Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi pada 24 Maret 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung C Komplek Perkantoran Kabupaten Bandung Barat  
Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah 40552

Bandung Barat, 19 Maret 2021

Nomor : 005/678-DLH  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth : Undangan (Terlampir -)  
di  
TEMPAT

Sehubungan dengan telah disampaikannya Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) tahun 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S.408/SEJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 pada tanggal 25 Februari 2021, setiap Kabupaten/Kota diminta untuk mengumpulkan data lingkungan hidup yang dirangkum dalam DIKPLH daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Maret 2021  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab. Bandung Barat  
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan DIKPLH Kab. Bandung Barat

Mengingat pentingnya kegiatan ini, diharapkan Saudara dapat hadir tepat pada waktunya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Widiya (telp. 081321422686).

Demikian surat undangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
  
BSEP SODIKIN, MUM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630801 199203 1 004

Tembusan:  
Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)



Lampiran

Nomor : 000 / 678 - DLH

Tanggal : 9 Maret 2021

#### DAFTAR UNDANGAN

1. Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Kepala Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bandung Barat;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
7. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat;
8. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
9. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat;
10. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat;
11. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat;
12. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat;
13. Yth. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
14. Yth. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
15. Yth. Kepala UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
16. Yth. Kepala Stasiun Padalarang PT. Kereta Api Indonesia
17. Yth. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat KABUT
18. Yth. Sdri. Eka Wardhani, ST, MT (akademisi Institut Teknologi Nasional)
19. Yth. Sdr. Dr Eng Didin Permadi M.Eng (Akademisi Institut Teknologi Nasional)





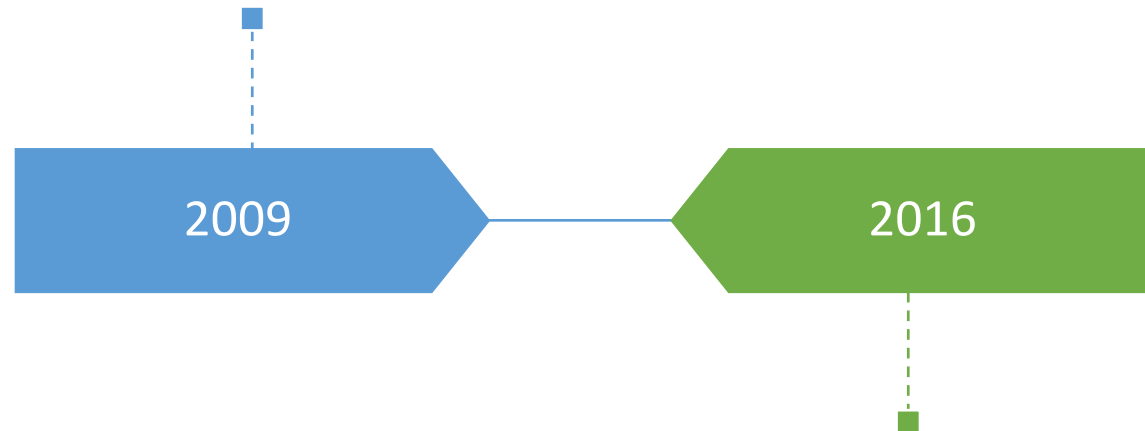
# NIRWASITA TANTRA

PUSAT DATA DAN INFORMASI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN

OLEH:  
DR EKA WARDHANI, ST.,MT  
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN  
ITENAS BANDUNG

# LATAR BELAKANG

Didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 : ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 62 ayat (2) : “Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat”



Diperlukan adanya bentuk penghargaan kepada Kepala Daerah yang berprestasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

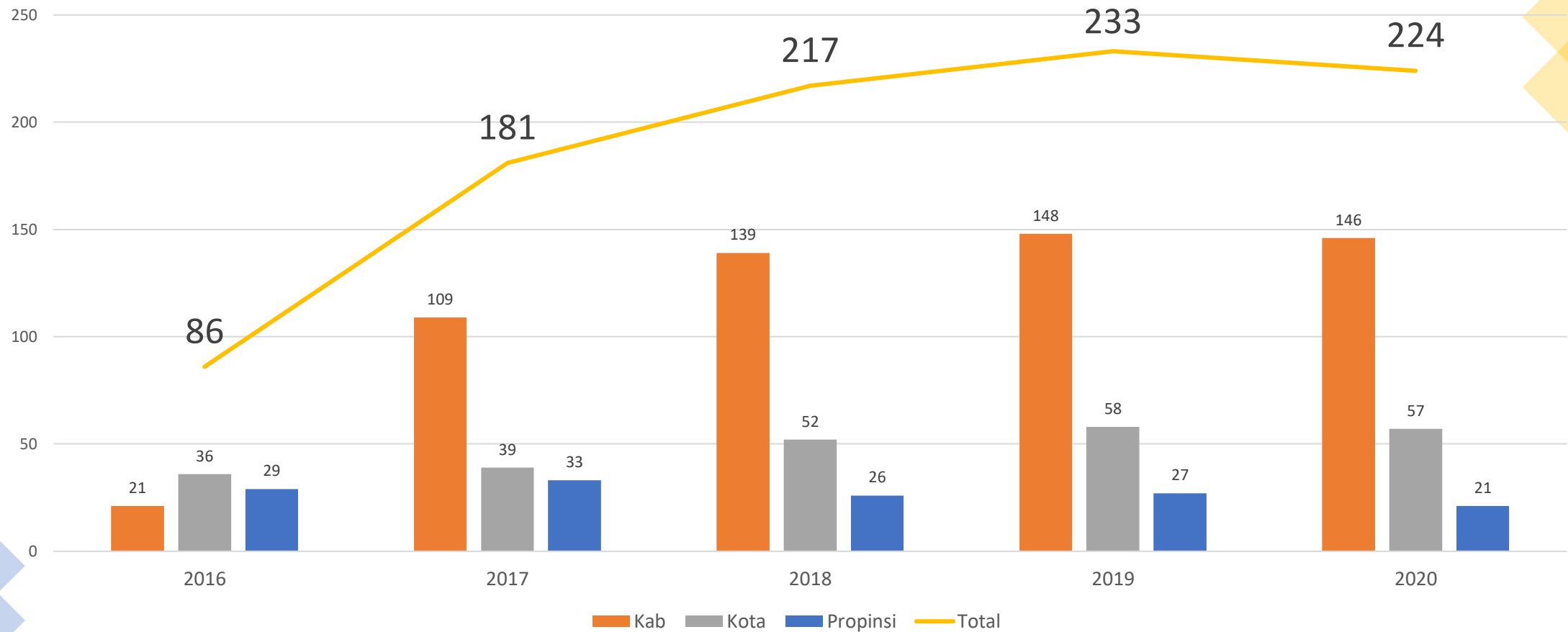
# Perkembangan Penilaian Dokumen DIKPLHD



Penggunaan Sistem Informasi Data Alam

DPSIR:  
Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response

# Jumlah peserta Nirwasita Tantra 2016 - 2020





# APA SAJA YANG BERUBAH ???

UNSUR	2016	2017	2018	2019 &2020	2021
PENYELENGGARA	KEMEN LHK	KEMEN LHK	KEMENLHK	KEMENLHK	KEMENLHK
PESERTA	SELURUH PROVINSI, NOMINATOR KAB/KOTA	SELURUH KAB/KOTA & PROV.	SELURUH KAB/KOTA & PROV.	SELURUH KAB/KOTA & PROV.	SELURUH KAB/KOTA & PROV.
JENIS DOKUMEN	BUKU DATA & BUKU ANALISA	BUKU RINGSEK & BUKU IKPLHD	BUKU RINGSEK & BUKU IKPLHD	BUKU RINGSEK & BUKU IKPLHD	BUKU RINGSEK & BUKU IKPLHD
JUMLAH TABEL	66	53	53	65	61
PENILAI	TIM PANEL, P3E	TIM PANEL	TIM PANEL	TIM PANEL	TIM PANEL
PENGHARGAAN	PIALA NIRWASITA TANTRA	PIALA NIRWASITA TANTRA	PIALA NIRWASITA TANTRA	PIALA NIRWASITA TANTRA	PIALA NIRWASITA TANTRA

# KETENTUAN PENYUSUNAN

1. Disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang melibatkan setidaknya OPD terkait, perguruan tinggi, & Lembaga masyarakat. Dikukuhkan dengan SK Kepala Daerah

2. Penetapan isu prioritas berdasarkan proses partisipatif pemangku kepentingan menggunakan metoda DPSIR. Terdiri dari minimal 3 isu dan maksimal 5 isu.

3. Penyusunan DIKPLHD mulai disusun pada bulan Januari dan telah selesai paling lambat di bulan juli tanggal 31 juli 2021

# SISTEMATIKA PENYUSUNAN

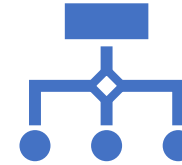
Dokumen  
Informasi  
Kinerja  
Pengelolaan  
Lingkungan  
Hidup Daerah  
(DIKPLHD)  
terdiri atas 2  
(dua) buku :



## Buku I

menyajikan Ringkasan  
Eksekutif dari Informasi  
Kinerja Pengelolaan Lingkungan  
Hidup Daerah.

Ringkasan Eksekutif maksimal  
terdiri atas 15 halaman



## Buku II

berisikan laporan utama  
informasi kinerja pengelolaan  
lingkungan hidup daerah.

Laporan utama ini disajikan dg  
melakukan hubungan  
kausalitas antara unsur-unsur  
penyebab terjadinya persoalan  
lingkungan hidup, status, dan  
upaya untuk memperbaiki  
kualitas lingkungan .





# KELENGKAPAN ADMINISTRASI

TANDA TANGAN KEPALA DAERAH PADA KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS SECARA PARTISIPATIF  
MELIBATKAN STAKEHOLDER (OPD, AKADEMISI, PEMERINTAH, MASYARAKAT,)

SK TIM PENYUSUN DIKPLHD

KETERLIBATAN STAKEHOLDER (AKADEMISI, LSM,  
MASYARAKAT, DLL) DALAM SK TIM PENYUSUN

BIODATA TIM PENYUSUN

PETA SPATIAL DAERAH

KELENGKAPAN DOKUMEN UTAMA DAN RINGKASAN  
EKSEKUTIF

FAKTA INTEGRITAS  
(DITANDA TANGANI OLEH KADIS LH, MENGETAHUI KEPALA DAERAH)



Baru

# SISTEMATIKA PENYUSUNAN

## BAB I : PENDAHULUAN

- latar belakang
- profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya;
- gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan DIKPLHD
- maksud dan tujuan
- ruang lingkup penulisan

## BAB II : ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

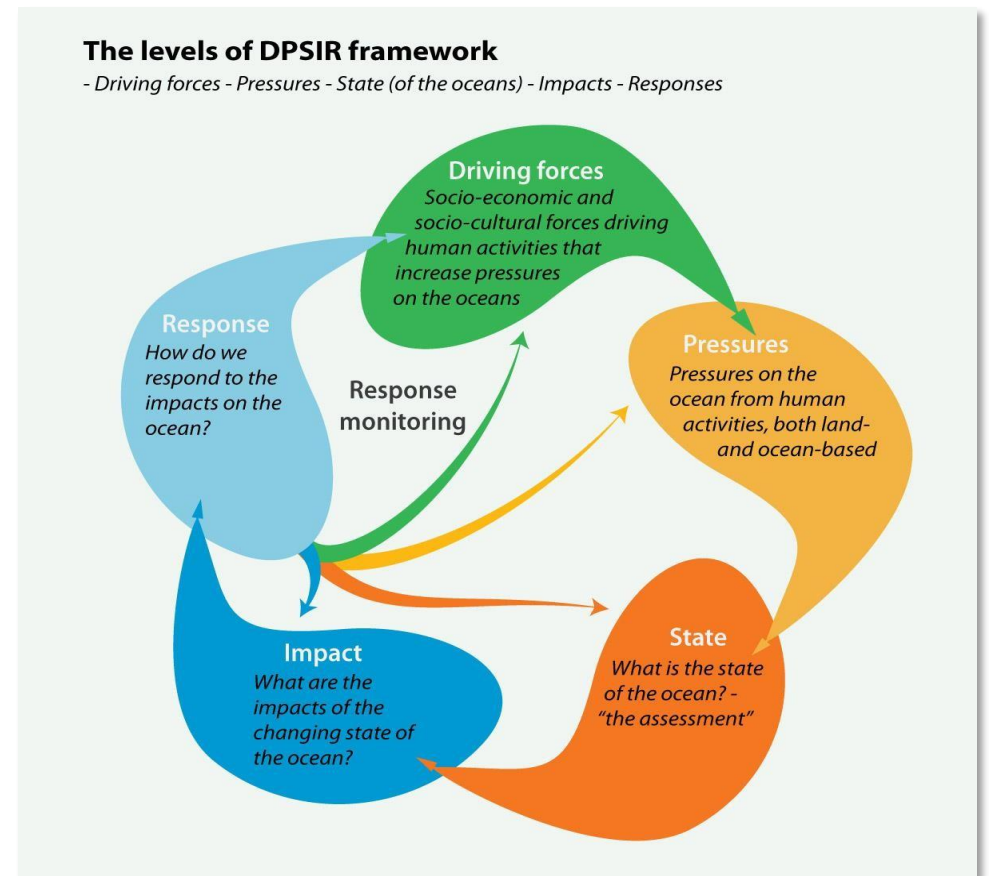
- ***Kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas :***
  - kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati;
  - pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan;
  - mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)

## BAB III : ANALISIS DPSIR ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- ***Memuat analisis DPSIR untuk masing-masing isu Lingkungan Hidup Daerah, yang meliputi :***
  - Tata guna lahan dan laut,
  - Kualitas air,
  - Kualitas udara,
  - Resiko Bencana,
  - Perkotaan

# ANALISIS DPSIR

<b>Driving Force</b>	Faktor Pemicu, Aktivitas Manusia Yang Mengarah Pada Berbagai Kegiatan Yang Dapat Memberikan Tekanan Kepada Lingkungan
<b>Pressure</b>	Tekanan Terhadap Lingkungan Yang Dihasilkan, Akibat Dari Proses Produksi Atau Konsumsi Yang Disebabkan Adanya Faktor Pemicu Yaitu Aktifitas Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhannya.
<b>State</b>	Keadaan Lingkungan, Hasil Dari Pressure Terhadap Lingkungan Dalam Satu Kawasan.
<b>Impact</b>	Dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan
<b>Response</b>	Kemungkinan adanya respon dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat, merupakan dampak yang tidak diinginkan dan mempengaruhi setiap bagian



Analisis ini merupakan pengembangan dari Model Analisis PSR (OECD 1993 dalam ZACHARIAS et al). Pendekatan ini didasarkan pada konsep SEBAB-AKIBAT yang dimulai dengan aktifitas manusia, yang menyebabkan adanya tekanan terhadap lingkungan dan mengubah kualitas dan kuantitas SDA hingga akhirnya mengakibatkan adanya respon dari masyarakat.



## Tim Panelis





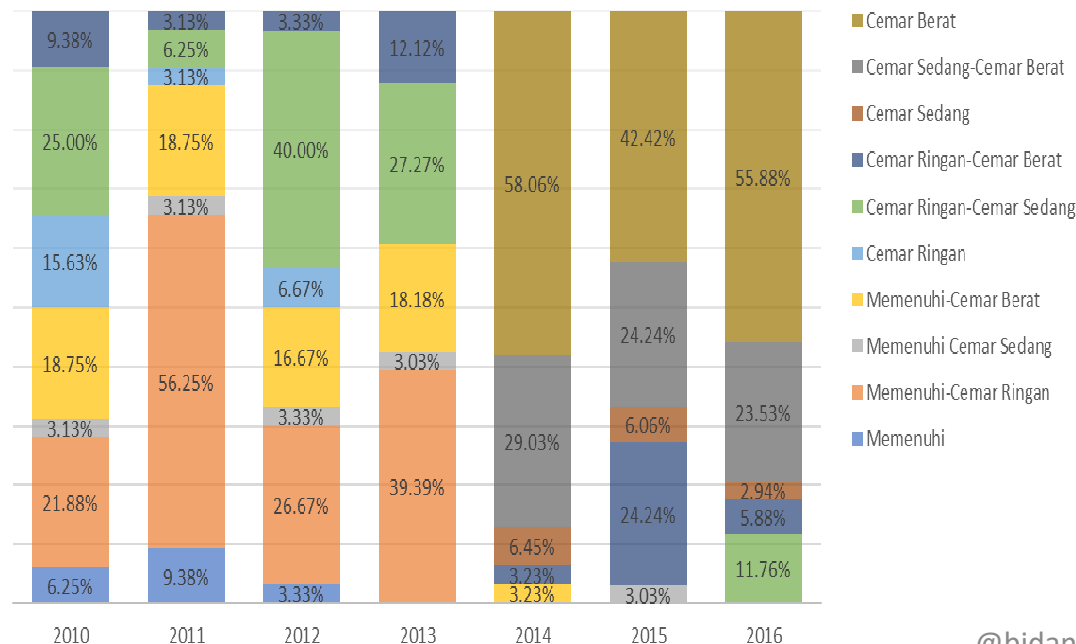
Terima kasih



# ISU 1 : KUALITAS DAN KUANTITAS AIR

Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi</li> <li>Terbatasnya Sumber Daya Air</li> <li>Pengelolaan limbah domestik yang belum optimum</li> <li>Kemiskinan dan wilayah kumuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan penduduk perkotaan</li> <li>Sanitasi dan perilaku hidup bersih</li> <li>Pertumbuhan industri</li> <li>Perubahan tata guna lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas Air Sungai</li> <li>Koefisien Regim Sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan Air Bersih</li> <li>Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan dan penegakan hukum</li> <li>Program Nasional pengelolaan SDA</li> <li>Program Daerah dalam Pengelolaan SDA</li> <li>Program Pengelolaan Logam Berat</li> </ul>

## STATUS KUALITAS AIR DI INDONESIA



## INOVASIDAEERAH

- Kegiatan Patroli Sungai bertujuan untuk membantu mengendalikan beban pencemaran sungai melalui keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan sungai secara periodik.
- Penegakan hukum (GAKUM) adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.
- Program PROPER (Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan)
- Pengujian parameter kualitas lingkungan di Laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan

## ISU 2 : SUMBER DAYA LAHAN

Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan penduduk</li> <li>Sebaran penduduk</li> <li>Pertumbuhan ekonomi</li> <li>Kondisi geografis, geologi dan meteorologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas pemukiman</li> <li>Aktivitas pertanian dan perkebunan</li> <li>Aktivitas pertambangan dan energi</li> <li>Kebakaran hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deforestasi</li> <li>Tutupan Lahan</li> <li>Lahan Kritis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bencana Lingkungan (Kekeringan, Banjir, Tanah Longsor)</li> <li>Pencemaran tanah dan air</li> <li>Menurunnya produktivitas lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi terkait Pengelolaan</li> <li>Regulasi terkait Pengendalian</li> <li>Program Nasional</li> <li>Program Daerah</li> </ul>

### Hotspot

Tahun	NOAA		Terra Aqua	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2015	21.929	82,15	70.971	94,58
2016	3.915	34,07	3.844	36,52
2017	2.581	58,02	2.440	45,16
2018*	1.007		1.338	

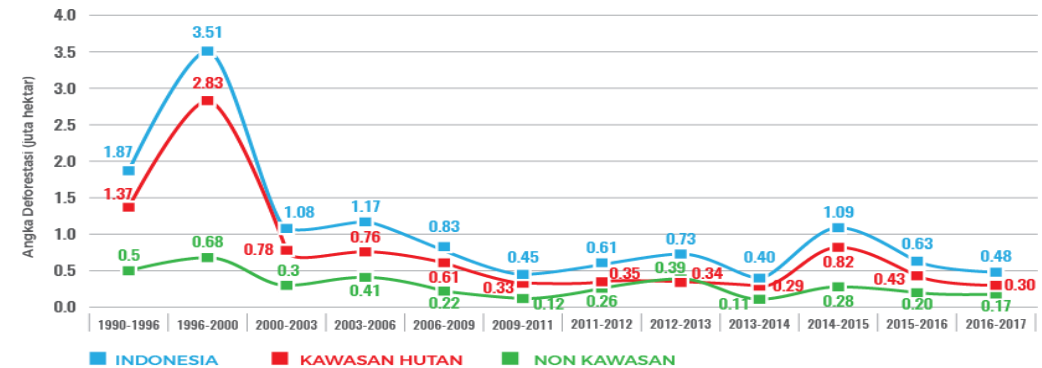
\*Juli 2018

SUMBER: Dit. PKHL, 2018

### Areal Terbakar

Tahun	Cambut	Mineral	Jumlah	%
2015	891.275	1.720.136	2.611.411	83,21
2016	97.787	340.576	438.363	62,25
2017	13.555	151.929	165.484	56,73
2018*	56.357	15.601	71.958	

\*Juli 2018



SUMBER: KLHK, 2018a

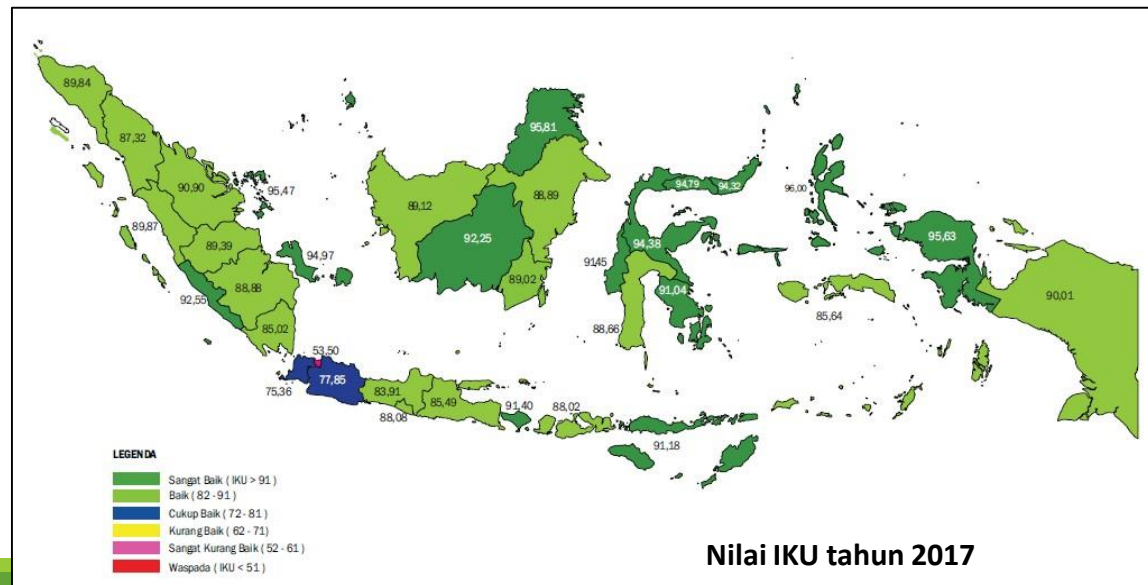
### INOVASIDERAH

- Perlindungan Terhadap Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pelaksanaan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Reforestasi



# ISU 3 : PENCEMARAN UDARA

Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi</li> <li>Motorisasi dalam transportasi yang mengakibatkan tingginya konsumsi energi</li> <li>Bencana alam seperti letusan gunung berapi</li> <li>Meteorologi daerah tropis yang memperkuat reaksi fotokimia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas bahan bakar masih perlu diperbaiki</li> <li>Standar teknologi mesin untuk kendaraan</li> <li>Deforestasi yang menyebabkan transport kabut asap</li> <li>Minim suply bahan bakar bersih di daerah non perkotaan di sektor domestic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecenderungan perbaikan kualitas udara CO, SO<sub>2</sub> dan Pb di daerah perkotaan</li> <li>Kecenderungan penurunan kualitas udara akibat tingginya NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub> dan PM<sub>10</sub></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dampak paparan Pb dari sektor transportasi terhadap kesehatan manusia semakin menurun</li> <li>Dampak terhadap kesehatan dan vegetasi semakin signifikan akibat paparan thdp konsentrasi O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> dan hujan asam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan bakar bebas timbal</li> <li>Perbaikan standar mesin sektor transportasi</li> <li>Perbaikan kualitas bahan bakar secara bertahap</li> <li>Pengelolaan lahan gambut yang lebih baik</li> <li>Partisipasi dan peran serta masyarakat (CFD, CFN)</li> </ul>

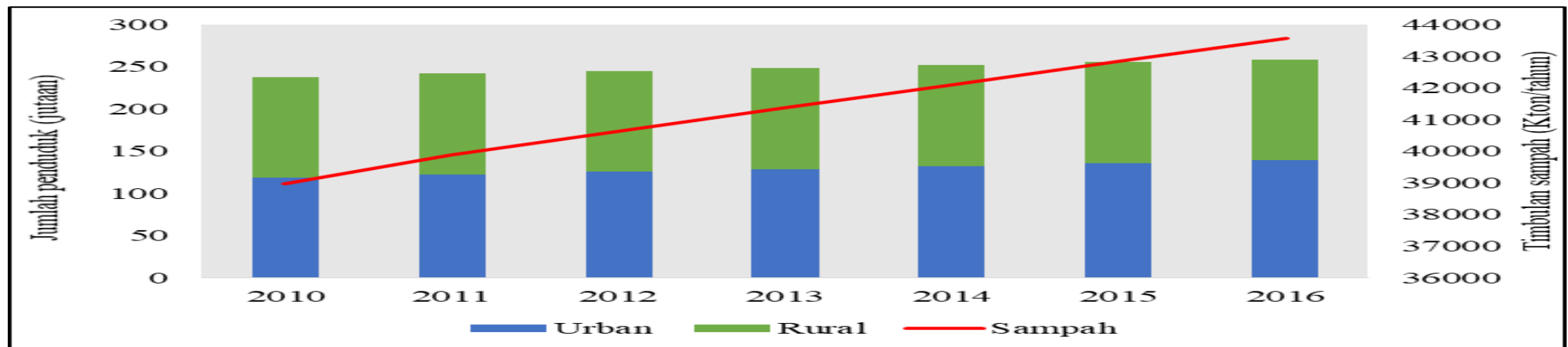


## INOVASIDAEERAH

- Program langit biru untuk pengontrolan sumber bergerak dan sumber titik (Kepmen LH No. 15/1996)
- Bahan bakar bebas timbal setelah tahun 2006
- Program PROPER telah mendorong penurunan emisi dari sumber titik/stationary source
- Program konversi bahan bakar minyak tanah ke LPG untuk sektor domestik

# ISU 4: PERSAMPAHAN

Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan penduduk</li> <li>Tingkat kesejahteraan</li> <li>Kompleksitas sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya peran serta masyarakat</li> <li>Teknik operasional pengelolaan sampah yang belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timbulan Sampah</li> <li>Sumber sampah dan komposisi</li> <li>Sarana dan prsarana pengelolaan sampah</li> <li>Beban pembiayaan pengelolaan sampah</li> <li>Sampah plastik di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesehatan masyarakat dan estetika</li> <li>Bencana</li> <li>Konflik Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan</li> <li>Hukum</li> <li>Program nasional dalam pengelolaan lingkungan</li> <li>Program daerah dlm pengelolaan lingkungan</li> </ul>



## INOVASIDAEERAH

- Pembangunan TPA pada 163 kawasan;
- Penyediaan fasilitas 3R komunal pada 850 kawasan;
- Penyediaan fasilitas pengolahan sementara sampah pada 45 kawasan; dan
- Penetapan peraturan pengembangan SPAM, sanitasi, dan persampahan.



# SISTEMATIKA PENULISAN

## BAB IV : INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN

- Memuat inisiatif-inisiatif yg dilakukan oleh kepala daerah dlm upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yg terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

## BAB V : PENUTUP

- Memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yg berimplikasi kpd kebijakan kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pustaka yg diacu harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan primer.

## LAMPIRAN

- Berupa lampiran-lampiran yg relevan dg penulisan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti perhitungan data, peta, foto, keputusan kepala daerah yg terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun

# PENGISIAN DALAM SISTEM SILHKD ( MELALUI SISTEM INFORMASI ; [www.dataalam.menlhk.go.id](http://www.dataalam.menlhk.go.id))

1

- Tabel diisi lengkap berdasarkan pedoman yg disesuaikan dengan kondisi tipologi masing2 daerah.

2

- Tabel diberi judul dg urutan Tabel 1, Tabel 2, ..., Tabel 65.

3

- Kemutakhiran data yg digunakan adalah data terbaru

4

- Sumber data wajib dicantumkan dan berasal dari lembaga yg dpt dipertanggungjawabkan (lembaga pemerintahan).

5

- Apabila ada data yg tidak bisa terisi karena perbedaan tipologi maka pd data tsb diisi N/A (*Not Available*).

6

- Apabila ada data yg tdk dilakukan pengukuran atau pengujian mk diisi dg strip (-) dan diberi keterangan.



# TAHAPAN PENILAIAN

## TAHAPAN PENAPISAN

Penilaian atas buku ringkasan eksekutif, dan validitas, akurasi, serta kejelasan data, menggunakan metode analisis pembobotan sederhana. Hasil penapisan ini digunakan untuk menentukan nominator yang akan memasuki tahapan selanjutnya.



## TAHAPAN PENILAIAN ATAS ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA *PRESSURE-STATE* DAN *RESPONSE*

Hasil dari penilaian buku utama ditetapkan nominator untuk setiap tingkatan pemerintahan provinsi, kabupaten, & kota.

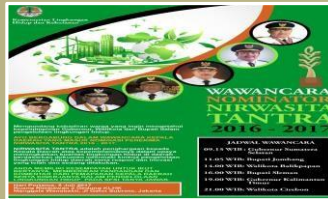


## TAHAPAN DISKUSI PANEL

merupakan seleksi tahap akhir dalam bentuk presentasi kepala daerah.



# DISKUSI PANEL



Pemahaman thd doc  
IKPLHD dan Memiliki  
Pemahaman terhadap  
masalah Lingkungan  
Hidup Daerah

Bagaimana IKPLHD  
dimanfaatkan oleh  
Kepala Daerah dalam  
merespon persoalan  
lingkungan Hidup di  
daerahnya

Inovasi dan *leadership*  
Kepala Daerah dalam  
merespon persoalan  
Lingkungan Hidup  
Daerah

